

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria*, Bandung: Alumni, 2009.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2000.
- Aminuddin Salle, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Makassar: Penerbit ASPublishing, 2011.
- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Arief Budiman, *Aneka Konsep Surat Perjanjian atau Kontrak*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Harsono (1), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- (2), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya*, Jilid 1, Jakarta: Djambatan, 2005.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Gouw Giok Siong, *Hukum Agraria antar Golongan*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960.
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartono Hadi Soeprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan-IV, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetakan I, Jakarta: Universitas Trisakti, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Maria S.W. Sumarjono, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isyu di Seputaran Undang-Undang Hak Tanggungan*, Jogjakarta: Liberty, 1996.

- Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2011.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002.
- Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- M. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Cetakan 3, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Cetakan-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Jakarta: Media Boga Utama, 1998.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Salim HS, H, S.H., M.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetkan.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

S. Chandra. *Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Zaeni Asyhdie dan Rachman Arief Rachman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

### **C. Hasil Penelitian**

Herwandi, *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

### **D. Rujukan Elektronik**

Indrangali, “ *Sejarah Hukum Agraria Ingonesia* ”, 2014, (<http://indrangali.blogspot.co.id>), diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 22.10 WIB.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-agraria-suatu-pengantar/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 17.10 WIB.

<http://www.areabaca.com/2015/03/pengertian-hukum-agraria-dan-asas-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 17.23 WIB.

<http://universitastaban.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/7.-adisurya.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 22.03 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, pukul 19.10 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11210/sengketa-kepemilikan-tanah>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, pukul 20.20 WIB.

<http://makalah2107.blogspot.co.id/2016/05/makalah-hukum-agraria-tentang-peralihan.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2017, pukul 14.20 WIB.

<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/pembebanan-hak-atas-tanah-dengan-hak-tanggung/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017, pukul 22.10 WIB.

M.Sofa, "*Peralihan Hak Milik atas Tanah*", <http://massofa.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 09.34 WIB.

Zaka Firma Aditya, dkk, *Revitalisasi Fungsi Sertipikat Hak atas Tanah Guna Mencegah Terjadinya Sertipikat Ganda atas Tanah*, Makalah Hukum Agraria, Universitas Negeri Semarang, 2011, <http://zakaaditya.blogspot.com/2011/11/revitalisasi-fungsi-sertifikat-hakatas.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 10.52 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 09.21 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-umum-hukum-benda/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 11.44 WIB.

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 22.44 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/-pengertian-pinjam-meminjam-uang.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017, pukul 14.38 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017, pukul 15.11 WIB.

<http://fiaji.blogspot.co.id/2007/09/penyelesaian-sengketa-pertanahan-fia-s.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017, pukul 11.43 WIB.

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017, pukul 11.53 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat>, diakses pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 19.12 WIB.

